Jurnal ILMU HUKUM • FAKULTAS HUKUM • UNIVERSITAS RIAU
ISSN (P) : 2087-8591
ISSN (O) : 2654-3761

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index

ANALISIS PERILAKU FRAUD DALAM KASUS KORUPSI BUPATI KUTAI KARTANEGARA PERIODE 2010-2021

Toby Roviuddarjat

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadyah Yogyakarta, Indonesia,
Email:roviuddarjat@gmail.com

Article Info

Article History:
Received : 21-01-2022
Revised : 13-07-2022
Accepted : 09-10-2022
Published : 17-02-2022

Keywords:
Corruption
Fraud
Kutai Kartanegara Regent

Abstract

This study examines fraud (Corruption) behavior of Kutai Kartanegara Regent 2010-2021 period namely Rita Widyasari in the perspective of Fraud Triangle which consists of pressure, Opportunity, and rationalization element.This type of research are qualitative research with a case study approach.The data collection technique in this study was conducted through documentation and concentrated on secondary data types that will be managed with the help of Nvivo 12 plus through a coding process that will be further analyzed by the similarity of coding, crostab querys process to facilitate fraud visualization.The findings in this study shows that fraud that comitted by Kutai Kartanegara Regent influenced by the three elements of the fraud triangle which showed that pressure factor is the dominant factor of the perpetrator in committing fraud action compared to the other two factors such as opportunity and rationalization.

Informasi Artikel

Histori Artikel:
Diterima : 21-01-2022
Direvisi : 13-07-2022
Disetujui : 09-10-2022
Diterbitkan : 17-02-2022

Kata Kunci:
Korupsi
Fraud
Bupati Kutai Kartanegara

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang perilaku *fraud* (Korupsi) Bupati Kutai Kartanegara periode 2010-2021 yakni Rita Widyasari dalam perspektif *Fraud Triangle* yang terdiri elemen *pressure*, *Opportunity*, *dan rationalization*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi yang lebih terfokus atau dikonsentrasikan pada jenis data sekunder yang akan dikelola dengan bantuan Nvivo 12 plus melalui proses koding dan dianalisis dari kesamaan koding, proses *crostab querys* dalam mempermudah visualisasi *fraud*. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa *fraud* yang dilakukan oleh Bupati Kutai Kartanegara dipengaruhi ketiga elemen dari *fraud triangle* yang menunjukkan bahwa faktor *pressure* merupakan faktor dominan dari pelaku dalam melakukan tindakan *fraud* dibandingkan dengan kedua faktor lain yakni *opportunity* dan *rationalization*.

PENDAHULUAN

Konsepsi fraud didefinisikan sebagai segala perbuatan dengan niat menipu untuk kepentingan diri sendiri.[1] Bentuk *fraud* yang sering terjadi pada sektor publik adalah korupsi, baik itu dalam jenis gratifikasi maupun penyuapan serta bentuk lainnya yang dilakukan demi mencapai keuntungan pihak-pihak yang melakukan penipuan.

Tindakan *fraud* dalam bentuk korupsi yang merupakan bentuk pelanggaran hukum terjadi secara sitematik, terstruktur dan masif dapat berakibat buruk pada keuangan Negara serta melanggar norma norma ekonomi serta sosial pada masyarakat secara luas. Perilaku kecurangan/*fraud* dalam bentuk korupsi terjadi baik di Negara maju ataupun berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia, pada *corruption perception index* 2019 berada pada *rank* 85 dari 180 negara dengan score 40.[2]

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengurangi kecenderungan *fraud* dalam bentuk korupsi yang terjadi dalam era digitalisasi ini, seperti halnya e-government dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien yang apabila diterapkan secara konsisten, maka praktik-praktik koruptif dalam pelayanan publik dapat dihilangkan dengan didukung oleh payung hukum berupa UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[3]

Dengan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah tersebut, seharusnya praktek korupsi semakin berkurang, tapi kenyataannya jika melihat dari kasus korupsi yang terjadi di Indonesia masih memberikan hasil yang berbeda. Melihat data dari tahun 2015 sampai dengan 2018, ditunjukkan bahwa kasus terjadinya korupsi di Indonesia masih fluktuatif. Hal ini terlihat dari laporan tren penindakan yang dilakukan oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*) yakni pada tahun 2015 terdapat 550 penindakan, lalu pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 482 penindakan kasus, lalu kembali mengalami kenaikan

[1] Yusak Naa And Hotman Pohan, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memicu Potensi Fraud Pemerintah Kabupaten Mimika , Papua", *Jurnal Magister Akuntansi* 6, No. 1 (2019): 1–26, Https://Doi.Org/Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.25105/Jmat.V6i1.5059.

[2] Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2019," 2019, https://www.transparency.org/country/IDN.

[3] Elsa Debora Manurung, "Perilaku Anti Korupsi", *Vej* 5 (2019): 399–420, Https://Doi.Org/10.25123/Vej.3614.

pada tahun 2017 dengan 576 kasus dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 454 kasus korupsi yang ditindak.[4]

Gambar 1

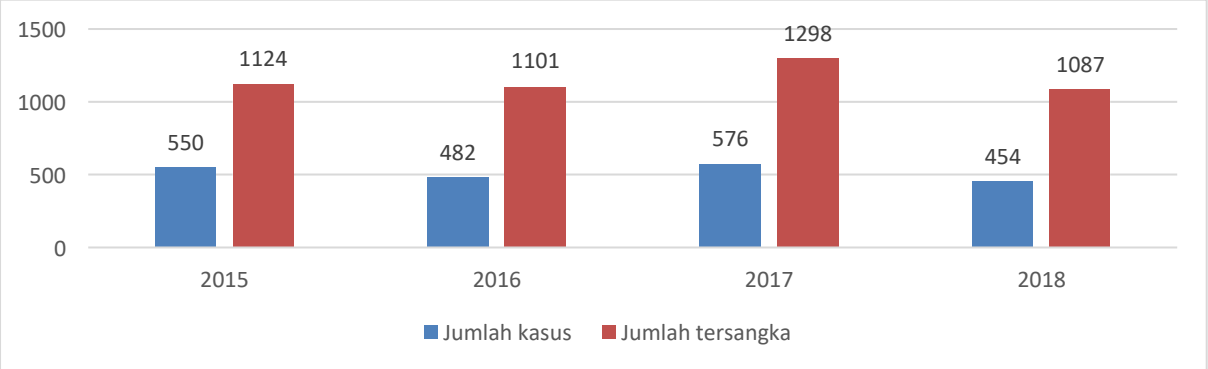

Gambar 1. Tren penindakan kasus korupsi 2015-2018

Kinerja penegak hukum dikatakan belum maksimal dalam memberantas korupsi dilihat dari jumlah penanganan kasus dan aktor yang ditetapkan sebagai tersangka (gambar 1). Ditegaskan bahwa belum maksimalnya penindakan terhadap tindak pidana korupsi dilihat dari kuantitas penanganan kasus dan aktor atau jumlah tersangka yang ditindak, karena korupsi tidak hanya dilakukan oleh segelintir pihak tetapi juga adanya pihak lain yang turut andil dalam kejahatan tersebut, baik secara aktif maupun pasif dalam merencakan kejahatan yang dilakukan.

Fraud dalam bentuk korupsi bisa dikatakan sudah menjadi "produk" dari kekuasaan. Korupsi dan kekuasaan ibarat dua sisi dari mata uang, kecurangan dalam bentuk korupsi mengiringi perjalanan dari suatu kekuasaan dan kekuasaan merupakan pintu masuk bagi korupsi.[5] Kasus *fraud* yang terjadi pada sector pemerintahan bisa terjadi pada semua lini. Dewasa ini, maraknya kasus kecurangan dengan jenis korupsi sudah merambah pada level eksekutif di daerah, seperti halnya Bupati/Walikota/Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah serta jabatan-jabatan struktural dalam eksekutif lainnya. Dalam pelaksanaannya, masih terjadi beberapa penyimpangan pada pemilihan Kepala Daerah yang melukai gagasan politik yang bersih dan sehat, karena setiap calon Kepala

[4] Wana Alamsyah, Lais Abid, And Agus Sunaryanto, "Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018", *ICW*, February 25, 2018, Https://Antikorupsi.Org/Sites/Default/Files/Laporan_Tren_Penindakan_Kasus_Korupsi_2018.Pdf.
[5] Achmad Sodiki, "Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo", *Jurnal Konstitusi* 6, No. 6 (2009), Https://Www.Mkri.Id/Public/Content/Infoumum/Ejurnal/Pdf/Ejurnal_Volume 6 Nomor 2, Juli 2009.Pdf.

Daerah menempuh banyak cara untuk mendapatkan kemenangan sehingga menimbulkan atau berimplikasi pula terhadap tindak kecurangan.

Maraknya kasus korupsi yang menimpa kepala eksekutif di daerah ini mendorong Kemendagri melakukan riset yang menyimpulkan bahwa faktor penyebab Kepala Daerah melakukan korupsi adalah tingginya biaya politik yang dikeluarkan ketika proses pemilihan.[6] Hal lain selain *cost* politik yang tinggi ada dua hal lain yang memicu korupsi terjadi bila dilihat dari individu yang terlibat, yakni karena ada kebutuhan (corruption by need), dan karena sikap rakus untuk menumpuk kekayaan (corruption by greed).[7] Dilihat dari data tindak pidana korupsi berdasarkan jabatan, jabatan sebagai kepala daerah memang masih rentan akan kecurangan dan penyelewengan kekuasaan yang terjadi dimana menurut data dari KPK mulai dari tahun 2013-2018 jumlah walikota/kepala daerah dan wakil yang ditindak berdasarkan jabatan ini mencapai 89 oknum.

Baru-baru ini, salah satu kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah cukup menghebohkan masyarakat, kasus ini terjadi pada Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari dengan sederet prestasi yang didapatkannya berupa *women icon of the year* dalam acara *Global Leadership Award* 2016, Samkaryanugraha Parasamya Purna Karya Nugraha 2015 dari Presiden RI, Adipura 2014, WTP 2013,2014, 2015 dari BPK RI serta Rita Widyasari pernah meraih tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha atas kinerja Kepala Daerah terbaik karena berhasil mengelola dan membuat Kabupaten Kukar menjadi salah satu Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah.[8]

Rita Widyasari selaku Bupati Kutai Kartanegara divonis hakim pengadilan tindak pidana korupsi setelah diketahui melakukan korupsi dengan jabatan dan kewenangan yang dimiliki melakukan tindakan yang berlawanan dari kewajiban dan tugasnya sebagai Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana yang tertera pada Pasal 12B Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP serta Pasal 12 b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Jo Pasal

[6] Iza Rumesten, "Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung," *Jurnal Dinamika Hukum* 14 (2014): 350–58, Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.20884/1.Jdh.2014.14.2.302.

[7] Laily Rahmawati, Maslichah, And M Cholid Mawardi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi Aparat Pemerintah Daerah", *E-JRA* 08, No. 06 (2019): 1–14, Http://Www.Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jra/Article/Viewfile/4082/3553.

[8] Rio Apinino, "Segudang Prestasi Mentereng Bupati Rita Widyasari Hingga Tersangka Korupsi", *Tirto Id*, September 27, 2017, Https://Tirto.Id/Rekam-Jejak-Mentereng-Bupati-Rita-Hingga-Tersangka-Korupsi-Cxlz.

64 ayat 1 KUHP. Tindakan koruptif dari Bupati Kutai Kartanegara ini bisa dikatakan kontradiktif dengan prestasi yang didapatkan.

Dari hal tersebut penelitian akan factor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi yang terjadi pada Kepala Daerah ini perlu untuk dikaji dengan tujuan dengan diketahuinya factor yang mempengaruhi perilaku *fraud* bisa menjadi salah satu upaya dalam melihat dan mencegah hingga membuat atau memperbaharui strategi dalam menindak terjadinya perilaku *fraud/*korupsi yang dilakukan eksekutif terutama Kepala Daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan banyak kajian atau penelitian dengan tema terkait *fraud.* Beberapa studi tentang analisa *fraud* adalah tentang analisis factor yang mempengaruhi *fraud* pada sektor pemerintahan di Kabupaten Papua, lalu penelitian tentang persepsi pegawai pemerintahan mengenai kecenderungan terjadinya *fraud* dan kajian lain dari *fraud* dalam bentuk korupsi pada pelayanan kesehatan di Indonesia pada era jaminan kesehatan nasional.[9] Dari beberapa penelitian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa elemen dari *fraud triangle* berpengaruh positif dan negative pada perilaku *fraud.* beberapa penelitian lain yang pernah dilakukan menunjukkan hasil yang sama dimana bahwa *rationalization* yang dilihat dari perilaku tidak etis organisasi berpengaruh positif atas terjadinya perilaku *fraud* sedangkan *pressure* dan *opportunity* memiliki pengaruh negative pada perilaku *fraud*.[10] Hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian pada Dinas-dinas yang ada di Kota Salatiga yang menunjukkan korelasi negative antara *rationalization* dengan kecenderungan *fraud.*[11] Mengkaji akan faktor atau keecenderungan *fraud*, diketahui bahwa pengendalian internal merupakan salah satu indicator penting dalam melihat kecenderungan *fraud.*

[9] Hanevi Djasri, Puti Aulia, And Eva Tirtabayu, "Korupsi Dalam Pelayanan Kesehatan Di Era Jaminan Kesehatan Nasional : Kajian Besarnya Potensi Dan Sistem Pengendalian Fraud" 2, No. 1 (2016): 113–33, Https://Jurnal.Kpk.Go.Id/Index.Php/Integritas/Article/View/127/25; Ika Ruly Pristiyanti, "Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintahan," *Accounting Analysis Journal* 1, No. 1 (2012), Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.15294/Aaj.V1i1.707.

[10] Ida Bagus Komang Suarcaya, Made Aristia Prayudi, And Nyoman Trisna Herawati, "Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal , Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Pada Persepsi Pegawai Koperasi Simpan," *E-Jurnal S1 Ak* 1, No. 2 (2017), Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.23887/Jimat.V8i2.14598; Muhammad Faisal, "Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus" *Accounting Analysis Journal* 2, No. 1 (2013), Https://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Aaj/Article/View/1181; Provita Wijayanti And Rustam Hanafi, "Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa," *Multiparadigma* 9, No. 2 (2018): 331–45, Https://Jamal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Jamal/Article/View/871.

[11] Aditya Pramudita, "Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintahan" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013).

Hasil penelitian pada instansi pemerintahan di Kota Tegal ini didukung oleh beberapa penelitian lain baik pada sector pemerintahan ataupun non pemerintahan yang menunjukkan bahwa system pengendalian internal melalui control ataupun monitoring memang memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*.[12]

Dari beberapa penelitian terkait diatas, kecenderungan fraud dianalisis pada subjek yang dalam bentuk instansi atau dalam ruang lingkup organisasi tentu dengan hasil yang berbeda. Tentu hal tersebut berbeda halnya dengan penelitian ini, artikel ini akan menjelaskan sudut pandang berbeda yang dimana tulisan ini akan meneliti secara empiris perilaku koruptif dari Kepala daerah atau pejabat eksekutif di Daerah karena dengan kewenangan yang dimiliki seorang pejabat dengan tindakannya secara tidak langsung juga akan mempengaruhi perilaku organisasi atau personel yang ada dibawahnya. Berangkat dari hal tersebut pertanyaan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana perilaku *fraud* dalam kasus korupsi Bupati Kutai kartanegara Periode 2010-2021 ?

Analisis perilaku *fraud* pada kasus korupsi ini akan dianalisis dengan teori *Fraud Triangle* yang yang mempengaruhi terjadinya kecurangan/*fraud* dari tiga elemen penting yang dicetuskan oleh Cressey (1953) yang terdiri dari *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi).[13] Pemilihan teori ini atas dasar pengakuan atau penerapan dan adopsi dari *fraud triangle* ini yakni pada *Statement of Auditing*

---

[12] Chindy Kurnia Rahma Dewi, "PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, KESESUAIAN KOMPENSASI, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, DAN PERILAKU TIDAK ETIS TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Bengkalis)," *JOM Fekon* 4, no. 1 (2017): 1443–57, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12835; Eka Fauzihardani, "Pengaruh Pengendalian Internal , Ketaaatan Pada Aturan Akuntansi Dan Kecenderungan Kecurangan Terhadap Perilaku Tidak Etis," *WRA* 1, no. 2 (2013): 259–76, https://doi.org/https://doi.org/10.24036/wra.v1i2.2641; William Alonzo Morehead, "INTERNAL CONTROL AND GOVERNANCE IN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS DESIGNED TO PROVIDE ACCOUNTABILITY AND DETER , PREVENT AND DETECT FRAUD AND CORRUPTION" (The University of Southern Mississippi, 2007), https://aquila.usm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2356&context=dissertations&httpsredir=1&referer=; Isnan Murdiansyah, Made Sudarma, and Nurkholis, "PENGARUH DIMENSI FRAUD DIAMOND TERHADAP PERILAKU KECURANGAN AKADEMIK (STUDI EMPIRIS PADA MAHASISWA MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS BRAWIJAYA)," *Jurnal Akuntansi Aktual* 4, no. 2 (2017): 121–33, http://journal2.um.ac.id/index.php/jaa/article/view/7094; Muammar Rizky and Fauziah Aida Fitri, "PENGARUH KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN INTERNAL , KETAATAN ATURAN AKUNTANSI , PENEGAKAN HUKUM , DAN PERILAKU TIDAK ETIS" 2, no. 2 (2017), http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/2409; Kennedy Samuel Sihombing, "Analisis Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2016 – 2018," *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 2019, 2, https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5780.

[13] Rizanti Khairunisa, Nashr Akbar, And Abrista Devi, "Exploring Strategies To Enhance Islamic Banking'S Role To Raise Cash Waqf Funds," *Iqtishadia* 10, No. 2 (2018): 1, Https://Doi.Org/10.21043/Iqtishadia.V10i2.2863.

Standards No. 99 (SAS No. 99) yang dikeluarkan oleh *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) pada tahun 2002, serta diadopsi oleh *International Federation of Accountants* (IFAC) pada tahun 2006.[14]

Gambar 2

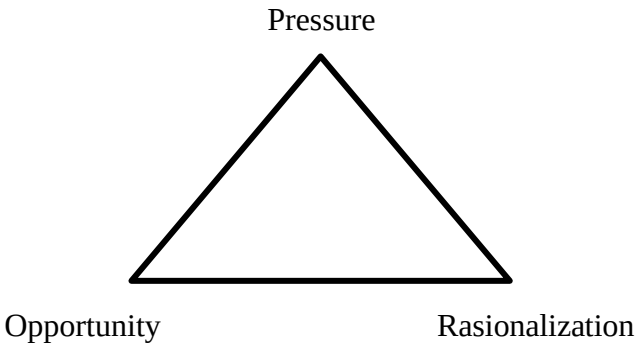

Gambar 2. *Fraud Triangle* oleh *Cressey* (1953)

Setiap elemen yang dijadikan variabel memiliki indikator dalam menentukan nilai dari setiap variabel yang dimana dalam penelitian ini, *pressure* diukur dari indikator *financial pressure* dan *work related pressure*, *oportunity* diukur dari *uneffective control* dan *rationalization* diukur dari budaya etis organisasi yang selanjutnya akan dijelaskan dan divisualisasikan.

Gambar 3

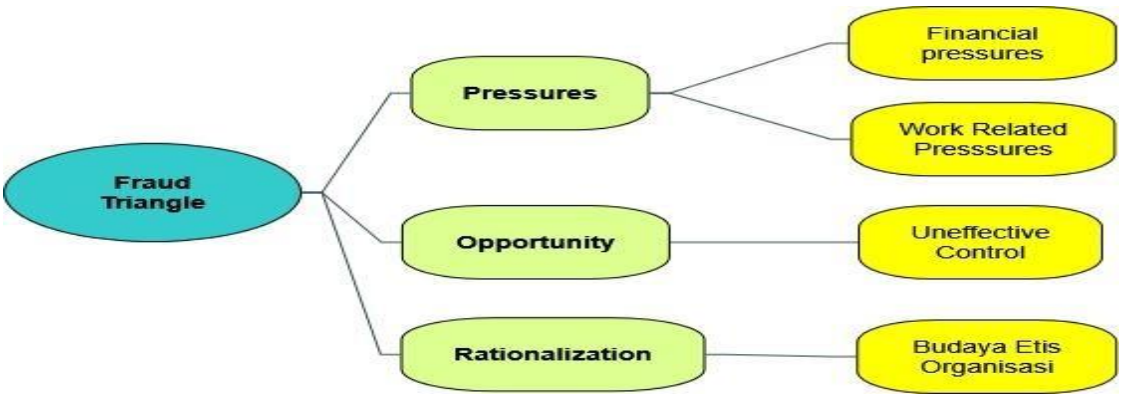

[14] Muhammad Azizul Islam, "Bribery And Corruption In Australian Local Councils," *Public Money And Management* 34, No. 6 (2014): 441–46, Https://Doi.Org/10.1080/09540962.2014.962372; Christian Hauser, "Fighting Against Corruption: Does Anti-Corruption Training Make Any Difference?," *Journal Of Business Ethics* 159, No. 1 (2019): 281–99, Https://Doi.Org/10.1007/S10551-018-3808-3; Christopher J. Skousen, Kevin R. Smith, And Charlotte J. Wright, *Detecting And Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness Of The Fraud Triangle And SAS No. 99 In Corporate Governance And Firm Performance*, *International Journal Of Quality & Reliability Management*, Vol. 32, 2009, Https://Doi.Org/10.1108/S1569-3732(2011)0000014001; Mark E. Lokanan, "Challenges To The Fraud Triangle: Questions On Its Usefulness," *Accounting Forum* 39, No. 3 (2015): 201–24, Https://Doi.Org/10.1016/J.Accfor.2015.05.002.

Gambar 3. Variabel dan Indikator *Fraud Triangle*

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data dari penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data online yang didapatkan baik dari jurnal, artikel dan berita dari media online bereputasi yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode dokumentasi. Tahapan pengumpulan data pada artikel ini ialah dengan mengumpulkan data sekunder dengan data berupa Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pid.Sus-TPK/2018 dan pencarian menggunakan mesin pencari web untuk mencari sumber data pada berita online.

Kata kunci yang digunakan dalam tahap pencarian antara lain "korupsi Rita Widyasari", "korupsi Kepala Daerah Kutai Kartanegara", dan "Korupsi Bupati Kutai Kartanegara". Website atau portal berita online yang ditemukan oleh mesin pencari pada arus utama (*mainstream*) akan digunakan sebagai data karena diketahui portal berita online pada arus utama (*mainstream)* diawasi oleh dewan pers sehingga validitasnya masih tetap terjaga.[15] Portal berita atau media online yang digunakan dalam mencari data yang dibutuhkan penelitian ini antara lain:

1. Jawa Pos
2. Kompas
3. Liputan 6
4. Merdeka
5. Nasional Tempo

Pada artikel ini digunakan metode analysis data kualitatif deskriptif. Dalam mendukung proses analisis data ini, penelitian ini menggunakan bantuan *Computer Asissted Qualitative Data Analysis Software* (CAQDAS) yakni *Nvivo 12 Plus*, dengan beberapa tahapan berupa proses pengelompokan (*coding)* data pada variabel yang telah ditetapkan, dan visualisasi data dengan menggunakan hasil analisis dari proses ekplorasi diagram, *hierarchy chart*, dan *crosstab querys* dalam mempermudah visualisasi data. Penggunaan Nvivo 12 plus pada penelitian ini karena dapat membantu dalam menganalisis data kualitaif berupa gambar,

[15] Yumantoko, "Stakeholder Collaboration In Handling Disaster-Based Tourism Destination In The Rinjani Mountain National Park," *Journal Of Forestry Research* 3 (2019): 15–28, Https://Ejournal.Forda-Mof.Org/Ejournal-Litbang/Index.Php/JPKF/Article/View/5165.

audio, halaman *website* dan sumber dokumen lain agar visualisasi hasil penelitian menghasilkan hasil yang lebih profesional.[16]

ANALISIS PERILAKU FRAUD BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Sisi pertama dari *fraud triangle* dalam menganalisis perilaku *fraud* Bupati Kutai Kartanegara pada penelitian ini yakni variabel *pressure* yang diukur dari dua indikator yakni *financial pressure* dan *Work related Pressure,* dimana *financial pressure* berkaitan dengan tekanan karena masalah keuangan pribadi atau kebutuhan hidup seperti halnya hutang, keserakahan (greedy) dan standar hidup sedangkan *work related pressure* berhubungan dengan tekanan pada kehidupan kerja pelaku *fraud*.[17]

Setelah melalui proses kesamaan *coding* ditemukan bahwa perilaku *fraud* Bupati Kutai Kartanegara dipengaruhi atas dasar tekanan financial (*financial pressure*) karena adanya hutang atau pinjaman yang dilakukan Bupati Kutai Kartanegara dalam mengikuti ajang PILKADA didaerah terkait. Biaya politik yang tinggi dan banyaknya pihak yang diberikan kemudahan izin dan konsesi oleh pelaku karena hubungan simbiosis mutualisme antara pelaku dan beberapa pengusaha yang membantu dalam proses kampanye pelaku sampai memenangkan ajang pemilihan Kepala Daerah memicu dan mempengaruhi perilaku koruptif yang dilakukannnya. Hal ini dibuktikan dari pernyataan salah satu saksi pada peradilan Rita Widyasari yakni Hanny Kristianto yang menegaskan pernyataan sebagai berikut:[18]

"*Uang tersebut untuk membayar hutang Rita selama pilkada kepada sejumlah pengusaha*"

[16] Dafrin Muksin, Titin Purwaningsih, And Achmad Nurmandi, "The Practice Of Political Dynasties At Local Level After Reform: Case Study Of Poitik Abdul Gani Kasuba And Ahmad Hidayat Mus In North Maluku Province Elections," *Wacana Politik* 4, No. 2 (2019): 133–44, Https://Jurnal.Unpad.Ac.Id/Wacanapolitik/Issue/View/1354; Achmad Nurmandi, Zuly Qodir, And J Hasse, "Polarisasi Politik Islam Di Twitter Dan Media Online Dalam Kontestasi Pilpres 2019," *Tandf* 2019 (2019), Https://Doi.Org/10.1080/03068374.2020.1812929.

[17] Rudy Hartanto et al., "Analysis of Factors That Influence Financial Statement Fraud in the Perspective Fraud Diamond: Empirical Study on Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange Year 2012 to 2014," *International Conference on Accounting Studies (ICAS)*, no. November (2015), https://doi.org/10.4108/eai.18-7-2019.2288648; Shaio Yan Huang et al., "Fraud Detection Using Fraud Triangle Risk Factors," *Information Systems Frontiers* 19, no. 6 (2017): 1343–56, https://doi.org/10.1007/s10796-016-9647-9; Chi Chen Lin et al., "Detecting the Financial Statement Fraud: The Analysis of the Differences between Data Mining Techniques and Experts' Judgments," *Knowledge-Based Systems* 89 (2015): 459–70, https://doi.org/10.1016/j.knosys.2015.08.011.

[18] Mahkamah Agung RI, "Putusan MA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN," 2018.

Perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang seharusnya merupakan langkah terbukanya peluang pemimpin yang sejalan dengan keinginan masyarakat yang ada di Daerah serta menjaga stabilitas roda pemerintahan dinodai dengan hadirnya birokrat dengan penyelewengan kewenangan yang dilakukan atas dasar tekanan cost politik yang tinggi. Setelah adanya pembenahan terhadap regulasi terkait Pilkada sesuai UU No 10 tahun 2016 yang membahas penggunaan politik uang dalam mempengaruhi pemilih serta sanksi pidana bagi para pelaku yang melanggar ketentuan tersebut dalam mengikuti pilkada, seharusnya perluasan wawasan dan pendidikan hukum terkait regulasi tersebut kepada masyarakat tidak hanya dilakukan saat menjelang pilkada tetapi juga secara konsisten dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai salah satu stakeholder yang juga turut andil dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada yang nantinya akan dilakukan di Daerah, sehingga praktek-praktek koruptif atas dasar tekanan politik uang dalam mengikuti ajang pilkada bisa diminimalisir.

Selanjutnya, diketahui atas dasar *financial pressure* dalam menumpuk kekayaan juga menjadi modus perilaku koruptif Rita Widyasari dengan jabatan yang lebih tinggi menyeret atau melibatkan aktor atau instansi atau organisasi pemerintahan lain yang ada dibawahnya atau aktor pada lembaga lain karena kekuasaan yang dimilikinya. Diketahui bahwa seorang pelaku *fraud* dalam menumpuk kekayaan melakukan penipuan dengan mengajak oknum lain untuk turut serta dalam penipuan yang dilakukannya, selain itu keserakahan ini juga bisa digunakan dalam melihat etika atau komitmen terhadap jabatan yang dimiliki oleh pelaku *fraud* untuk keuntungan personalnya.[19] Berikut beberapa aktor yang terlibat dengan Rita Widyasari yang dibagi menjadi dua kategori yakni birokrat dan politisi:

[19] Mdabdul Baten, "Beyond The Fraud Triangle; Why People Engage In Pecuniary Crimes?," *International Journal Of Advanced Research* 6, No. 1 (2018): 1002–7, Https://Doi.Org/10.21474/Ijar01/6313; Mery Marliani And Yulius Jogi, "Persepsi Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Pencurian Kas," *Journal Business Accounting Review* 3 (2015): 21–30, Http://Publication.Petra.Ac.Id/Index.Php/Akuntansi-Bisnis/Article/View/3846.

Gambar 4

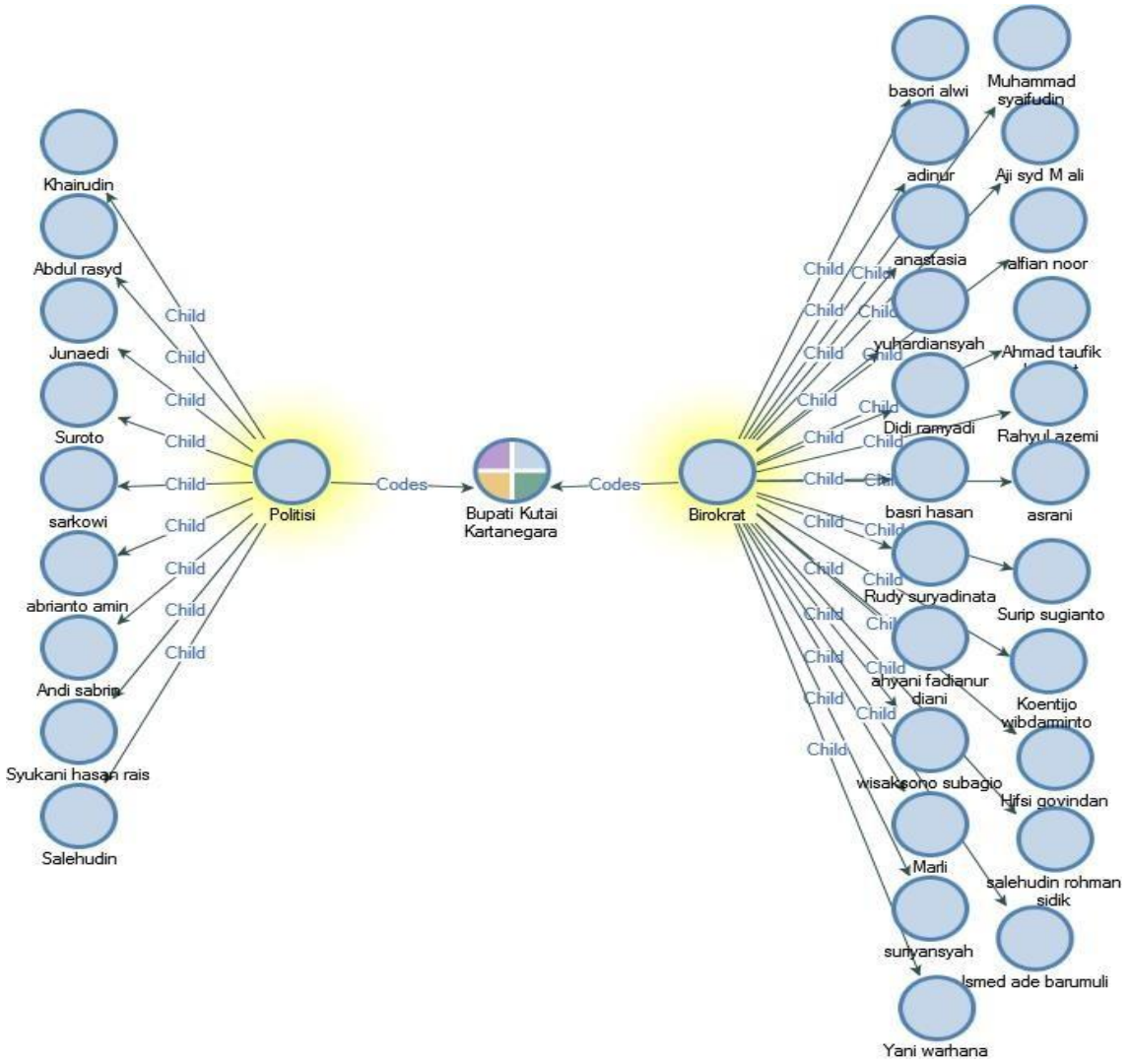

Gambar 4. Aktor yang terlibat dalam perilaku *fraud* Bupati Kutai Kartanegara

Merujuk pada visualisasi aktor yang terlibat pada gambar 2, ditunjukkan oknum birokrat lebih banyak terlibat dari pada oknum politisi karena hirarki jabatan pada tubuh birokrasi yang lebih tinggi dan politisi yang terlibat merupakan beberapa mantan anggota legislatif daerah dan kader partai yang menjadi tim pemengangan dan diangkat sebagai staff khusus oleh Bupati Kukar. Menurut keterangan para saksi yang pernah menjabat pada Instansi di Kabupaten Kukar dalam peradilan Bupati Kutai Kartanegara, disebutkan bahwa uang yang diterima dari pemungutan ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum birokrat akan diserahkan kepada politisi yang menjadi tim pemenangan Bupati Kukar setelah ditugaskan untuk mengumpulkan penerimaan *fee* dari para pengusaha untuk diserahkan kembali kepada

Bupati. Keterangan saksi juga menunjukkan bahwa setiap *fee* yang didapatkan nantinya akan dibagi dimana selain saksi yang mendapatkan honor adalah Ketua Komisi, Sekretaris Komisi, Ketua Sekretariat Komisi, Ketua Tim Teknis dan jabatan lainnya pada Dinas yang memiliki keterlibatan dalam melakukan pemungutan-pemungutan di Daerah atas dasar perintah dari politisi yang ditugaskan oleh Bupati Kutai Kartanegara. Keterlibatan dari jabatan-jabatan hirarkial pada instansi inilah yang menyebabkan aktor birokrat yang ditunjukkan gambar 2 lebih dominan dibandingkan dengan aktor lainnya.

Rita Widyasari juga terbukti memiliki standar hidup yang tinggi yang merupakan bagian dari *financial pressure* sehingga melakukan perilaku koruptif, dimana beberapa peruntukan uang hasil korupsi digunakan dalam beberapa hal seperti pembelian poperti berupa tanah, pembelian tas mewah, sepatu dan jam tangan bermerk, perawatan kecantikan serta peruntukan untuk hal-hal lainnya yang notabene memiliki harga yang tinggi.[20] Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menyatakan bahwa masalah keungan pribadi yang berkaitan dengan gaya hidup yang berlebihan agar terlihat superior, membuat pelaku korupsi membutuhkan insentif yang lebih besar atas kebutuhannya memicu perilaku koruptif.[21] Hal ini mengindikasikan bahwa kekuasaan pada jajaran eksekutif khususnya Kepala Daerah seharusnya memiliki integritas terhadap jabatannya sehingga perilaku koruptif atas dasar gaya hidup atau standar hidup yang tinggi tidak membuat Kepala Daerah menyalahgunakan kekuasaan dalam perilaku koruptif.

[20] Insensia Dianawati, "Intip Koleksi Barang Mewah Bupati Cantik Rita Widyasari," Liputan6.Com, 2018, Https://Www.Liputan6.Com/Lifestyle/Read/3240056/Intip-Koleksi-Barang-Mewah-Bupati-Cantik-Rita-Widyasari; Kuswandi, "KPK Sita Tanah Dan Bangunan Milik Mantan Bupati Kukar Rita Widyasari," JAWAPOS.Com, 2020, Https://Www.Jawapos.Com/Nasional/Hukum-Kriminal/24/07/2019/Kpk-Sita-Tanah-Dan-Bangunan-Milik-Mantan-Bupati-Kukar-Rita-Widyasari/; Sigid Kurniawan, "Bupati Kukar Diduga Pakai Uang Gratifikasi Untuk Rawat Kulit Dan Kecantikan," Kompas.Com, 2018, Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2018/01/26/19205751/Bupati-Kukar-Diduga-Pakai-Uang-Gratifikasi-Untuk-Rawat-Kulit-Dan-Kecantikan; Abba Gabrillin, "Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah Untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar," Kompas.Com, 2018, Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2018/01/16/17452221/Bupati-Kukar-Rita-Widyasari-Belanja-40-Tas-Mewah-Untuk-Samarkan-Gratifikasi.

[21] M Zaki Mahdi And Akbar Hadi, "Love Of Money Dengan Sikap Terhadap Korupsi Skripsi," *Eprintsumm* 42655 (2018): 1–71; Dayat N S Wiranta, "Transformasi Birokrasi : Cara Untuk Penguatan Etika Dan Integritas Dalam Pencegahan Korupsi," *Jurnal Lingkar Widyaiswara* 2, No. 4 (2015): 44–71, Http://Juliwi.Com/Published/E0204/Juliwi0204_44-71.Pdf.

Pada *Work related pressure* yakni berkaitan dengan masalah keuangan dalam segi kehidupan kerja pelaku korupsi atau fraud.[22] Setelah dilakukannya *coding* menggunakan Nvivo 12 Plus, pada indikator *Work related pressure* ditemukan bahwa masalah keuangan organisasi menjadi penyebab timbulnya aksi *fraud* yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kutai Kartanegara.

Adanya beberapa pengeluaran eksternal untuk instansi dilakukan dengan melakukan fraud. Rita Widyasari diketahui menggunakan uang dari hasil *fraud* untuk dana operasional partai yang menaungi pelaku. Menurut salah satu saksi yakni Junaidi yang juga menjadi salah satu tim pemenangan serta staff khusus dari Rita Widyasari yang juga rekan dari Bupati Kutai Kartanegara sebagai Kader pada Partai GOLKAR (Golongan Karya) menyatakan uang setoran atau gratifikasi yang didapatkan dan dilakukan oleh Rita Widyasari kerap digunakan untuk operasional partai GOLKAR (Golongan Karya) yang menjadi kendaraan politiknya.[23] Proposal yang diajukan masyarakat juga diakui telah dikeluarkan melalui uang pribadi, sehingga pelaku rugi secara financial karena buruknya kinerja instansi pemerintah ataupun kinerja dari organisasi politik yang dinaunginya sehingga merasa membutuhkan kompensasi yang lebih tinggi atas hasil kerjanya. Jika melihat dari gaji Kepala Daerah, total pendapatan yang didapatkan mencapai Rp 5.880.000 per bulan untuk gaji pokok, dan tunjangan jabatan. Jika dibandingkan dengan PDB perkapita yang mencapai Rp 42 juta pertahun menurut BPS pada tahun 2019.[24] Artinya dalam satu bulan pendapatan rata-rata orang Indonesia mencapai Rp 3,5 juta, maka gaji atau kompensasi yang dimiliki oleh seorang Kepala Daerah masih diatas rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku koruptif yang dilakukan oleh Rita Widyasari karena tuntutan keuangan partai yang tinggi terhadap kader dan kinerja keuangan instansi pemerintahan di daerah tersebut masih kurang kondusif.

[22] Hauser, "Fighting Against Corruption: Does Anti-Corruption Training Make Any Difference?"; Huang Et Al., "Fraud Detection Using Fraud Triangle Risk Factors"; Lin Et Al., "Detecting The Financial Statement Fraud: The Analysis Of The Differences Between Data Mining Techniques And Experts' Judgments."
[23] Endri Kurniawati, "Penerima Jatah Gratifikasi Proyek PU Selain Rita Widyasari," Tempo.Co, 2018, Https://Nasional.Tempo.Co/Read/1076456/Penerima-Jatah-Gratifikasi-Proyek-Pu-Selain-Rita-Widyasari.
[24] Badan Pusat Statistik, "PENDAPATAN NASIONAL (National Income Of Indonesia)," *Buku Publikasi Statistik*, 2020, 1–186, Https://Www.Bps.Go.Id/Publication/2020/06/12/7fe8d749c43bad46b1601662/Pendapatan-Nasional-Indonesia-2015-2019.Html.

Opportunity yang menjadi salah satu variable pada penelitian ini menggambarkan kondisi atau adanya kesempatan yang menyebabkan penipuan terjadi yang diukur dari indicator *uneffective control*.[25]

Banyaknya oknum ASN serta politisi dan private sector yang ikut terlibat menunjukkan bahwa control yang kurang efektif dan kesadaran antar sesama stakeholder dalam melaporkan tindakan *fraud* yang masih belum cukup kuat.[26] Keberadaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) sebagai sistem dalam mencegah berbagai penyimpangan di Daerah dipertanyakan efektifitasnya karena penyelenggaraan dan keberhasilan SPIP bergantung pada kewenangan Kepala Daerah.[27] Jika dikaji, sebelum terbitnya PP (Peraturan Pemerintah) No.
72 Tahun 2019 yang memperkuat kewenangan APIP (Aparat Pengendalian Intern Pemerintah) di Daerah yang memiliki tugas menjalankan SPIP, APIP memiliki kewenangan yang terbatas yang dimana kegiatan pengawasan yang dilakukan harus melalu persetujuan Kepala Daerah sehingga control terhadap Kepala Daerah sebelum terbitnya PP masih bisa dikatakan lemah, hal ini membuktikan bahwa fraud yang dilakukan oleh pejabat eksekutif yakni Kepala Daerah bisa dilakukan karena rancangan system control yang masih buruk.

Akuntabilitas yang merupakan langkah control dari kebijakan pemungutan yang dilakukan oleh Rita Widyasari yang tidak dipertanyakan dalam prinsip kepastian hukum oleh stakeholder juga membuat praktek ini terus berjalan padahal asas penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) sudah mendapatkan landasan yuridis.[28] Tidak adanya SK (Surat Keputusan) penunjukan staf khusus oleh Bupati Kutai Kartanegara sejak mulai menjabat menjadi Kepala Daerah menunjukkan kurang terbukanya informasi secara vertical sehingga

[25] Harry Cendrowski And James Martin, "The Fraud Triangle," *The Handbook Of Fraud Deterrence*, 2015, 41–46, Https://Doi.Org/10.1002/9781119202165.Ch5; Muhammad Nauval, "Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Financial Statement Fraud Dalam Perspektif Fraud Triangle," *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (2013): 1689–99, Https://Doi.Org/10.1017/CBO9781107415324.004.

[26] Helmy Fithriansyah, "Terima Gratifikasi Dan Suap, Rita Widyasari Divonis 10 Tahun Penjara," 2018, Https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Terima-Gratifikasi-Dan-Suap-Rita-Widyasari-Divonis-10-Tahun-Penjara.Html#:~:Text=Sebagai Kompensasi Terbitnya Izin%2C Rita,Kali Transaksi Di Periode 2010.&Text=Atas Penerimaan Suap%2C Rita Divonis,Pasal 64 Ayat 1 KUHP.; Yunita Amalia, "12 Kali Transaksi, Rita Widyasari Kumpulkan Gratifikasi Rp 469 Miliar," Merdeka.Com, 2018, Https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/12-Kali-Transaksi-Rita-Widyasari-Kumpulkan-Gratifikasi-Rp-469-Miliar.Html; Mahkamah Agung RI, "Putusan MA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN."

[27] Kemal Hidayah And Rustan, "Analisis Penerapan Unsur Lingkungan Pengendalian SPIP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara," *Jurnal Borneo Administrator* 11, No. 1 (2015): 72–99, Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24258/Jba.V11i1.186.

[28] Hasyim Asy'ari, "Korupsi Di Daerah Dan Penguatan Kontrol Masyarakat," *MMH* 42 (2013), Https://Doi.Org/10.14710/Mmh.42.1.2013.34-44.

membuat perilaku *fraud* yang dilakukan Bupati Kutai Kartanegara semakin menjadi.[29] Kurang terbukanya akses informasi lainnya yang ditemukan ialah dimana transparansi dan aksesibilitas informasi terkait adanya biaya paraf atau tambahan biaya lainnya dalam pengurusan izin ataupun kebijakan praktek pungutan biaya yang dibebankan kepada para pengusaha dan masyarakat dalam mengajukan perizinan. Kurangnya transparansi ini tentu melanggar amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Asimetri informasi yang ada dikabupaten Kartanegara ini juga membuat perilaku fraud Kepala Daerah Kukar lebih rentan terjadi. Dari hal tersebut bisa dilihat bahwa *opportunity* karena kurangnya control organisasi terhadap jabatan Bupati di daerah terkait menciotakan kesempatan dalam melakukan *fraud.*

Pada elemen terakhir yakni *rationalization*, indikator yang digunakan adalah budaya etis organisasi. Variabel *rationalization* sendiri berarti pembenaran pelaku atas perilaku tidak etis yang dilakukan dan menganggap bahwa aktifitas yang dilakukan bukan tindakan kriminal atau *fraud.*[30]

Dari hasil analisis yang dilakukan, hasil yang ditemukan pada elemen ini menunjukkan bahwa tindakan *fraud* Bupati Kutai Kartanegara disebabkan oleh perilaku- perilaku tidak etis dari pejabat-pejabat terdahulu. Perilaku-perilaku tidak etis ini berupa pemungutan-pemungutan secara illegal pada lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang bahkan sudah berlangsung lama. Diketahui bahwa kebijakan pungutan- pungutan illegal ini merupakan rahasia umum di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kukar. Terkait pemberian atau gratifikasi dan suap, pola pemberian ini juga disebutkan dilakukan oleh pengusaha ataupun perusahaan sebagai bentuk ucapan "terimakasih", yang bahkan BUMN juga melakukan hal semacam itu sebagai bentuk terimakasih. Berikut pernyataan salah satu saksi yakni Ichsan Suadi selaku Direktur PT Citra Gading Aristama terkait pemberian atau pemungutan illegal tersebut: [31]

[29] S Kukuh Wibowo, "Sidang Rita Widyasari, Saksi Beberkan Aliran Dana Dari Bos Sawit," Tempo.Co, 2020, Https://Nasional.Tempo.Co/Read/1073889/Sidang-Rita-Widyasari-Saksi-Beberkan-Aliran-Dana-Dari-Bos-Sawit; Mahkamah Agung RI, "Putusan MA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN."

[30] Abdullah Rabi'u And Mansor Noorhayati, "Fraud Triangle Theory And Fraud Diamond Theory . Understanding The Convergent And Divergent For Future Research," *International Journal Of Academic Research In Accounting, Finance And Management Sciences* 5, No. 4 (2015): 38–45, Https://Doi.Org/10.6007/IJARAFMS/V5-3/1823.

[31] Ninis Khirunnisa, "Sidang Rita Widyasari, Saksi Sebut Praktik Gratifikasi Sejak 2000," Tempo.Co, 2018, Https://Nasional.Tempo.Co/Read/1075929/Sidang-Rita-Widyasari-Saksi-Sebut-Praktik-Gratifikasi-Sejak-2000.

"praktik memberikan gratifikasi oleh perusahaannya dalam proyek di lingkungan Kabupaten Kutai Kertanegara sudah berjalan sejak 2000 silam"

Budaya tidak etis dari instansi dan pejabat dilingkungan pemerintahan ataupun perusahan yang memiliki kepentingan inilah yang membuat *fraud* atau praktek korupsi dianggap menjadi hal lumrah di Daerah tersebut. Praktek dari fenomena monoisme (Dominasi Politik keluarga) terhadap perilaku koruptif juga menjadi salah satu fenomena yang ditemukan dalam elemen *rationalization* ini dimana Ayah dari Rita Widyasari yang pernah menjabat sebagai Bupati Kutai kartanegara juga tersandung kasus yang sama sehingga Bupati Kutai Kartanegara yang menjabat memiliki tekanan dalam mengeluarkan ayahnya dari jeratan hukum.

Dari hasil analisis yang telah dideskripsikan dari setiap elemen fraud triangle diatas, perilaku *fraud/*Korupsi yang dilakukan Kepala Daerah Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh ketiga elemen *fraud triangle* dimana elemen jika dikaji dari nilainya maka *Pressure* merupakan elemen paling dominan dibandingkan dengan *fraud* elemen lain berupa *Opportunity* dan *rationalization.*

Gambar 5

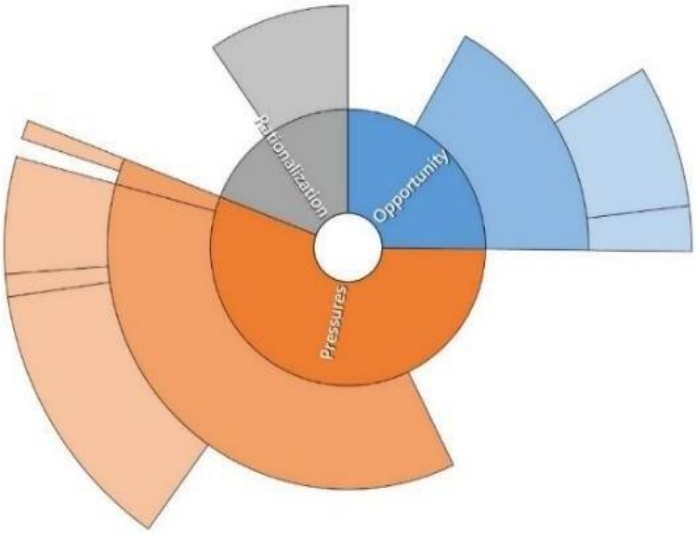

Gambar 5. *Hierarchy Chart fraud factor by number of coding*

Chart yang ditunjukkan diatas menunjukkan faktor dominan dari perilaku *fraud* yang dilakukan oleh Bupati Kutai Kartanegara yakni *pressures*. Hal ini berbanding lurus dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan di Austria dan Swiss serta penelitian lain yang menunjukkan *pressure* berpengaruh positif dan dominan terhadap kecenderungan *fraud* yang dilakukan oleh pelaku *fraud.*[32]

Lebih lanjut, penelitian ini memiliki indikator-indikator dalam menganalisis dan mengukur faktor *fraud* dan mempengaruhi variable yang digunakan. indikator-indikator dalam menganalisis dan mengukur faktor *fraud* dan mempengaruhi variable diatas, diantaranya yakni *Pressures* yang memiliki indikator *financial pressures* dan *work related pressures*, begitupun dengan kedua elemen lain yakni *Opportunity* dengan indikator *Uneffective control* dan yang terakhir yakni *rationalization* dengan indikator budaya etis organisasi.

Berikut porsentase dari keseluruhan indicator yang mempengaruhi hasil temuan dan nilai dari variable penelitian ini berdasarkan hasil *crosstab querys* sebagai berikut:

Gambar 6

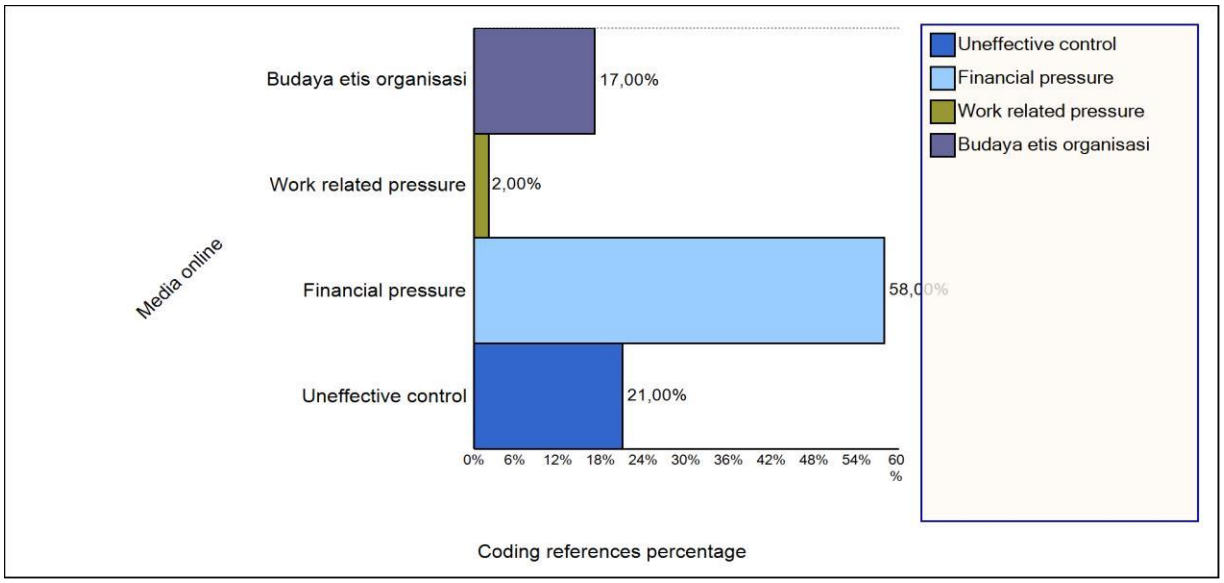

Gambar 6. *Crosstab query* indikator perilaku *fraud* Bupati Kutai Kartanegara

[32] Muhsin, . Kardoyo, And A Nurkhin, "What Determinants Of Academic Fraud Behavior? From Fraud Triangle To Fraud Pentagon Perspective," *Kne Social Sciences* 3, No. 10 (2018): 154, Https://Doi.Org/10.18502/Kss.V3i10.3126; Alexander Schuchter And Michael Levi, "Beyond The Fraud Triangle: Swiss And Austrian Elite Fraudsters," *Accounting Forum* 39, No. 3 (2015): 176–87, Https://Doi.Org/10.1016/J.Accfor.2014.12.001.

Pada hasil *coding* pada keseluruhan indikator yang digunakan dari data/case media online yang digunakan menunjukkan bahwa elemen *pressures* dengan indikator *financial pressures* memiliki porsentase paling dominan terhadap faktor *fraud* Bupati Kutai Kartanegara dengan porsentase 58% sedangkan indicator *work related pressures* memiliki nilai yang paling rendah pada kedua data yang digunakan dengan nilai 2%. Diikuti variabel *Opportunity* dengan indikator *uneffecive control* yang memiliki porsentase 21,00% pada hasil *coding* yang ditunjukkan. Sementara, indicator pada variabel terakhir yakni *rationalization* dengan indicator budaya etis organisasi memiliki nilai 17,00%.

KESIMPULAN

Perilaku *fraud* dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kutai Kartanegara periode 2010-2021 dipengaruhi oleh ketiga elemen dari *fraud triangle* yang dimana hasil analisis menunjukkan bahwa *pressure* merupakan faktor yang paling dominan dalam perilaku koruptif yang dilakukannya. Adanya tekanan secara financial serta dasar sistem pengawasan yang lemah dan masih menguntungkan Kepala Daerah dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki serta perilaku tidak etis dari pejabat terdahulu membuat jabatan sebagai Kepala Daerah masih rentan terhadap perilaku koruptif.

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini berupa monoisme (dominasi politik keluarga) yang juga mempengaruhi perilaku tidak etis dari pejabat eksekutif di daerah khususnya Kepala Daerah Kutai Kartanegara, sehingga perlu adanya tinjauan atau penelitian lebih lanjut terkait faktor yang mempengaruhi perilaku fraud pada masalah empiris berupa monoisme.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, Wana, Lais Abid, and Agus Sunaryanto. “Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018.” *ICW*, February 25, 2018. https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf.

Amalia, Yunita. “12 Kali Transaksi, Rita Widyasari Kumpulkan Gratifikasi Rp 469 Miliar.” Merdeka.com, 2018. https://www.merdeka.com/peristiwa/12-kali-transaksi-rita-widyasari-kumpulkan-gratifikasi-rp-469-miliar.html.

Apinino, Rio. “Segudang Prestasi Mentereng Bupati Rita Widyasari Hingga Tersangka

Korupsi." *Tirto Id*, September 27, 2017. https://tirto.id/rekam-jejak-mentereng-bupati-rita-hingga-tersangka-korupsi-cxlz.

Asy'ari, Hasyim. "Korupsi Di Daerah Dan Penguatan Kontrol Masyarakat." *MMH* 42 (2013). https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.34-44.

Badan Pusat Statistik. "PENDAPATAN NASIONAL (National Income of Indonesia)." *Buku Publikasi Statistik*, 2020, 1–186. https://www.bps.go.id/publication/2020/06/12/7fe8d749c43bad46b1601662/pendapatan-nasional-indonesia-2015-2019.html.

Baten, MdAbdul. "Beyond the Fraud Triangle; Why People Engage in Pecuniary Crimes?" *International Journal of Advanced Research* 6, no. 1 (2018): 1002–7. https://doi.org/10.21474/ijar01/6313.

Cendrowski, Harry, and James Martin. "The Fraud Triangle." *The Handbook of Fraud Deterrence*, 2015, 41–46. https://doi.org/10.1002/9781119202165.ch5.

Dewi, Chindy Kurnia Rahma. "PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, KESESUAIAN KOMPENSASI, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, DAN PERILAKU TIDAK ETIS TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Bengkalis)." *JOM Fekon* 4, no. 1 (2017): 1443–57. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12835.

Dianawati, Insensia. "Intip Koleksi Barang Mewah Bupati Cantik Rita Widyasari." Liputan6.com, 2018. https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3240056/intip-koleksi-barang-mewah-bupati-cantik-rita-widyasari.

Djasri, Hanevi, Puti Aulia, and Eva Tirtabayu. "Korupsi Dalam Pelayanan Kesehatan Di Era Jaminan Kesehatan Nasional : Kajian Besarnya Potensi Dan Sistem Pengendalian Fraud" 2, no. 1 (2016): 113–33. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/127/25.

Faisal, Muhammad. "ANALISIS FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN KUDUS." *Accounting Analysis Journal* 2, no. 1 (2013). https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/1181.

Fauzihardani, Eka. "Pengaruh Pengendalian Internal , Ketaaatan Pada Aturan Akuntansi Dan Kecenderungan Kecurangan Terhadap Perilaku Tidak Etis." *WRA* 1, no. 2 (2013): 259–76. https://doi.org/https://doi.org/10.24036/wra.v1i2.2641.

Fithriansyah, Helmy. "Terima Gratifikasi Dan Suap, Rita Widyasari Divonis 10 Tahun Penjara," 2018. https://www.merdeka.com/peristiwa/terima-gratifikasi-dan-suap-rita-

widyasari-divonis-10-tahun-penjara.html#:~:text=Sebagai kompensasi terbitnya izin%2C Rita,kali transaksi di periode 2010.&text=Atas penerimaan suap%2C Rita divonis,Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Gabrillin, Abba. "Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah Untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar." Kompas.com, 2018. https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/17452221/bupati-kukar-rita-widyasari-belanja-40-tas-mewah-untuk-samarkan-gratifikasi.

Hartanto, Rudy, Lasmanah, Muhammad Ridwan Mustafa, and Pupung Purnamasari. "Analysis of Factors That Influence Financial Statement Fraud in the Perspective Fraud Diamond: Empirical Study on Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange Year 2012 to 2014." *International Conference on Accounting Studies (ICAS)*, no. November (2015). https://doi.org/10.4108/eai.18-7-2019.2288648.

Hauser, Christian. "Fighting Against Corruption: Does Anti-Corruption Training Make Any Difference?" *Journal of Business Ethics* 159, no. 1 (2019): 281–99. https://doi.org/10.1007/s10551-018-3808-3.

Hidayah, Kemal, and Rustan. "Analisis Penerapan Unsur Lingkungan Pengendalian SPIP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Borneo Administrator* 11, no. 1 (2015): 72–99. https://doi.org/https://doi.org/10.24258/jba.v11i1.186.

Huang, Shaio Yan, Chi Chen Lin, An An Chiu, and David C. Yen. "Fraud Detection Using Fraud Triangle Risk Factors." *Information Systems Frontiers* 19, no. 6 (2017): 1343–56. https://doi.org/10.1007/s10796-016-9647-9.

Islam, Muhammad Azizul. "Bribery and Corruption in Australian Local Councils." *Public Money and Management* 34, no. 6 (2014): 441–46. https://doi.org/10.1080/09540962.2014.962372.

Khairunisa, Rizanti, Nashr Akbar, and Abrista Devi. "Exploring Strategies To Enhance Islamic Banking'S Role To Raise Cash Waqf Funds." *Iqtishadia* 10, no. 2 (2018): 1. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2863.

Khirunnisa, Ninis. "Sidang Rita Widyasari, Saksi Sebut Praktik Gratifikasi Sejak 2000." Tempo.co, 2018. https://nasional.tempo.co/read/1075929/sidang-rita-widyasari-saksi-sebut-praktik-gratifikasi-sejak-2000.

Kurniawan, Sigid. "Bupati Kukar Diduga Pakai Uang Gratifikasi Untuk Rawat Kulit Dan Kecantikan." Kompas.com, 2018.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/26/19205751/bupati-kukar-diduga-pakai-uang-gratifikasi-untuk-rawat-kulit-dan-kecantikan.

Kurniawati, Endri. “Penerima Jatah Gratifikasi Proyek PU Selain Rita Widyasari.” Tempo.co, 2018. https://nasional.tempo.co/read/1076456/penerima-jatah-gratifikasi-proyek-pu-selain-rita-widyasari.

Kuswandi. “KPK Sita Tanah Dan Bangunan Milik Mantan Bupati Kukar Rita Widyasari.” JAWAPOS.com, 2020. https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/07/2019/kpk-sita-tanah-dan-bangunan-milik-mantan-bupati-kukar-rita-widyasari/.

Lin, Chi Chen, An An Chiu, Shaio Yan Huang, and David C. Yen. “Detecting the Financial Statement Fraud: The Analysis of the Differences between Data Mining Techniques and Experts’ Judgments.” *Knowledge-Based Systems* 89 (2015): 459–70. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2015.08.011.

Lokanan, Mark E. “Challenges to the Fraud Triangle: Questions on Its Usefulness.” *Accounting Forum* 39, no. 3 (2015): 201–24. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.05.002.

Mahdi, M Zaki, and Akbar Hadi. “Love of Money Dengan Sikap Terhadap Korupsi Skripsi.” *Eprintsumm* 42655 (2018): 1–71.

Mahkamah Agung RI. “Putusan MA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN,” 2018.

Manurung, Elsa Debora. “PERILAKU ANTI KORUPSI.” *Vej* 5 (2019): 399–420. https://doi.org/10.25123/vej.3614.

Marliani, Mery, and Yulius Jogi. “Persepsi Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Pencurian Kas.” *Journal Business Accounting Review* 3 (2015): 21–30. http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/article/view/3846.

Morehead, William Alonzo. “INTERNAL CONTROL AND GOVERNANCE IN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS DESIGNED TO PROVIDE ACCOUNTABILITY AND DETER , PREVENT AND DETECT FRAUD AND CORRUPTION.” The University of Southern Mississippi, 2007. https://aquila.usm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2356&context=dissertations&httpsredir=1&referer=.

Muhsin, . Kardoyo, and A Nurkhin. “What Determinants of Academic Fraud Behavior? From Fraud Triangle to Fraud Pentagon Perspective.” *KnE Social Sciences* 3, no. 10 (2018):

154. https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3126.

Muksin, Dafrin, Titin Purwaningsih, and Achmad Nurmandi. “The Practice of Political Dynasties at Local Level after Reform: Case Study of Poitik Abdul Gani Kasuba and Ahmad Hidayat Mus in North Maluku Province Elections.” *Wacana Politik* 4, no. 2 (2019): 133–44. https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/issue/view/1354.

Murdiansyah, Isnan, Made Sudarma, and Nurkholis. “PENGARUH DIMENSI FRAUD DIAMOND TERHADAP PERILAKU KECURANGAN AKADEMIK (STUDI EMPIRIS PADA MAHASISWA MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS BRAWIJAYA).” *Jurnal Akuntansi Aktual* 4, no. 2 (2017): 121–33. http://journal2.um.ac.id/index.php/jaa/article/view/7094.

Naa, Yusak, and Hotman Pohan. “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMICU POTENSI FRAUD PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA , PAPUA.” *Jurnal Magister Akuntansi* 6, no. 1 (2019): 1–26. https://doi.org/Doi: http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v6i1.5059.

Nauval, Muhammad. “Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Financial Statement Fraud Dalam Perspektif Fraud Triangle.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.

Nurmandi, Achmad, Zuly Qodir, and J Hasse. “Polarisasi Politik Islam Di Twitter Dan Media Online Dalam Kontestasi Pilpres 2019.” *Tandf* 2019 (2019). https://doi.org/10.1080/03068374.2020.1812929.

Pramudita, Aditya. “Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintahan.” Universitas Negeri Semarang, 2013.

Pristiyanti, Ika Ruly. “PERSEPSI PEGAWAI INSTANSI PEMERINTAH MENGENAI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN.” *Accounting Analysis Journal* 1, no. 1 (2012). https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v1i1.707.

Rabi’u, Abdullah, and Mansor Noorhayati. “Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory . Understanding the Convergent and Divergent For Future Research.” *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences* 5, no. 4 (2015): 38–45. https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-3/1823.

Rahmawati, Laily, Maslichah, and M Cholid Mawardi. “FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI TINDAK PIDANA KORUPSI APARAT PEMERINTAH DAERAH." *E-JRA* 08, no. 06 (2019): 1–14. http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/4082/3553.

Rizky, Muammar, and Fauziah Aida Fitri. "PENGARUH KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN INTERNAL , KETAATAN ATURAN AKUNTANSI , PENEGAKAN HUKUM , DAN PERILAKU TIDAK ETIS" 2, no. 2 (2017). http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/2409.

Rumesten, Iza. "Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung." *Jurnal Dinamika Hukum* 14 (2014): 350–58. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.302.

Schuchter, Alexander, and Michael Levi. "Beyond the Fraud Triangle: Swiss and Austrian Elite Fraudsters." *Accounting Forum* 39, no. 3 (2015): 176–87. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2014.12.001.

Sihombing, Kennedy Samuel. "Analisis Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2016 – 2018." *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 2019, 2. https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5780.

Skousen, Christopher J., Kevin R. Smith, and Charlotte J. Wright. *Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99 in Corporate Governance and Firm Performance*. *International Journal of Quality & Reliability Management*. Vol. 32, 2009. https://doi.org/10.1108/S1569-3732(2011)0000014001.

Sodiki, Achmad. "Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 6 (2009). https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume 6 Nomor 2, Juli 2009.pdf.

Suarcaya, Ida Bagus Komang, Made Aristia Prayudi, and Nyoman Trisna Herawati. "PENGARUH KESESUAIAN KOMPENSASI, Pengendalian INTERNAL , DAN PERILAKU TIDAK ETIS TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN (FRAUD) (STUDI KASUS PADA PERSEPSI PEGAWAI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SE-KECAMATAN BULELENG)." *E-Jurnal S1 Ak* 1, no. 2 (2017). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.14598.

Transparency International. “Corruption Perceptions Index 2019,” 2019. https://www.transparency.org/country/IDN.

Wibowo, S Kukuh. “Sidang Rita Widyasari, Saksi Beberkan Aliran Dana Dari Bos Sawit.” Tempo.co, 2020. https://nasional.tempo.co/read/1073889/sidang-rita-widyasari-saksi-beberkan-aliran-dana-dari-bos-sawit.

Wijayanti, Provita, and Rustam Hanafi. “PENCEGAHAN FRAUD PADA PEMERINTAHAN DESA.” *Multiparadigma* 9, no. 2 (2018): 331–45. https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/871.

Wiranta, Dayat N S. “Transformasi Birokrasi : Cara Untuk Penguatan Etika Dan Integritas Dalam Pencegahan Korupsi.” *Jurnal Lingkar Widyaiswara* 2, no. 4 (2015): 44–71. http://juliwi.com/published/E0204/Juliwi0204_44-71.pdf.

Yumantoko. “Stakeholder Collaboration in Handling Disaster-Based Tourism Destination in The Rinjani Mountain National Park.” *Journal of Forestry Research* 3 (2019): 15–28. https://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPKF/article/view/5165.